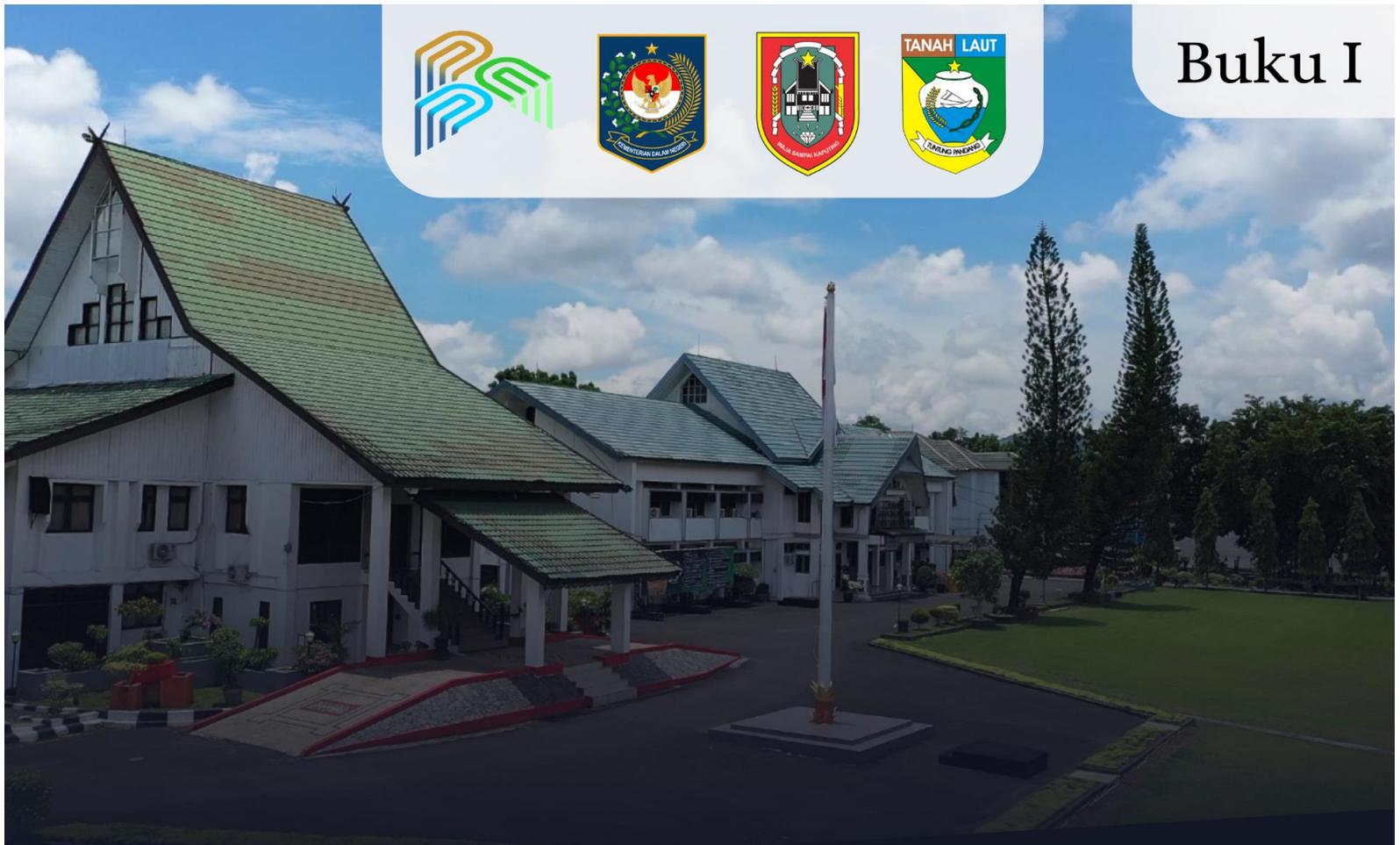




Buku I



*Perubahan*

**RKPD**

**KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2023**

 (0512) 21036

 [www.bappeda.tanahlautkab.go.id](http://www.bappeda.tanahlautkab.go.id)

 [talabappeda@gmail.com](mailto:talabappeda@gmail.com)

 **bappeda**  
KABUPATEN TANAH LAUT



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan, penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program, dan adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL. SH. MH**  
**NIP.19750203 199963 2 008**

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 75

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.4 Hubungan antar Dokumen.....	I-4
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-5
<b>BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	II-1
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kerangka Ekonomi Makro.....	III-1
3.1.1 Asumsi Dasara Ekonomi Makro Nasional .....	III-1
3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .....	III-2
3.1.3 Inflasi.....	III-3
3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut .....	III-4
3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-8
3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-8
3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-12
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-7
4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2023 .....	IV-7
4.2.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Sasaran Dearah.....	IV-10
4.2.3 Sinkronisasi Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut .....	IV-



4.2.5 Strategi dan Kebijakan Pencapaian Prioritas.....	IV-
15	
4.2.6 Program Unggulan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 .....	IV-
18	
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
Lampiran Evaluasi RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan Tahun 2023 .....	II-1
2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 .....	II-3
2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2023 .....	II-5
3.1. Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022 .....	III-5
3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022.....	III-5
3.3. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Tahun 2022 .....	III-7
3.4. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	III-10
3.5. APBD Murni 2023 dan Proyeksi Perubahan APBD 2023 .....	III-13
4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kabupaten Tanah Laut .....	IV-2
4.2 Tema RKP dan Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	IV-10
4.3 Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 .....	IV-13
4.4 Tema Pembangunan dan Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	IV-14
4.5 Keselarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas RKPD Tahun 2023 .....	IV-14
4.6 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Daerah.....	IV-19
4.7 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Provinsi .....	IV-25
4.8 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional .....	IV-42
5.1 Rekapitulasi Jumlah Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 .....	V-2

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1. Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan .....	III-1
3.2. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2023 (persen) .....	III-2
3.3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen) .....	III-2
3.4. Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022 .....	III-3
3.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022 .....	III-6
4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Tanah Laut Th. 2023 .....	IV-19

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun rangkaian penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun alasan-alasan yang mendasar dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;
3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
4. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
5. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Bupati Tanah Laut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah;

## 1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutaman Gender di Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk

menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 ini dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023. Adapun dokumen RKPD Tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Kerangka Ekonomi Makro
- 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **BAB VI PENUTUP**

## BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

### 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. Adapun gambaran capaian kinerja capaian kinerja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terlihat pada rincian realisasi APBD TA. 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Realisasi APBD TA. 2023 sampai dengan 30 Juni 2023**

Rincian Belanja	APBD 2023	Pergeseran APBD 2023	Realisasi 30 Juni 2023	%
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.761.088.881.265</b>	<b>1.761.088.881.265</b>	<b>997.081.590.069,89</b>	<b>56,61</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	223.171.641.465	223.171.641.465	87.911.324.234,90	39,39
Pajak Daerah	49.171.000.000	49.171.000.000	21.607.847.659,48	43,94
Retribusi Daerah	11.946.804.500	11.946.804.500	2.441.633.785,00	20,43
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.330.112.415	13.330.112.415	11.855.672.488,00	88,93
Lain-lain PAD yang Sah	148.723.724.550	148.723.724.550	52.006.170.302,42	34,96
Pendapatan Transfer	1.536.761.239.800	1.536.761.239.800	909.087.273.620,00	59,15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.414.901.539.800	1.414.901.539.800	795.874.562.242,00	56,24
Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000	121.859.700.000	113.212.711.378,00	92,90
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.156.000.000	1.156.000.000	82.992.215,00	7,17
Pendapatan Hibah	1.156.000.000	1.156.000.000	52.014.169,00	4,49
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	30.978.046,00	0,00
<b>BELANJA</b>	<b>2.255.548.951.409</b>	<b>2.256.807.552.447</b>	<b>819.609.733.839,00</b>	<b>33,64</b>
Belanja Operasi	1.434.964.476.863	1.441.449.319.848	610.079.878.729,00	38,19
Belanja Pegawai	752.559.542.098	752.559.542.098	330.699.870.820,00	43,94
Belanja Barang dan Jasa	614.236.841.999	614.409.163.655	255.207.254.959,00	31,63
Belanja Hibah	57.166.102.766	63.478.624.095	24.172.752.950,00	40,41
Belanja Bantuan Sosial	11.001.990.000	11.001.990.000	0,00	0,00
Belanja Modal	557.346.687.055	555.801.008.108	86.073.813.255,00	15,43
Belanja Modal Tanah	1.481.250.000	1.481.250.000	38.764.000,00	2,61

Rincian Belanja	APBD 2023	Pergeseran APBD 2023	Realisasi 30 Juni 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.465.951.523	100.996.983.239	16.046.202.597,00	15,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.957.289.306	184.880.578.643	29.187.374.552,00	15,78
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	261.771.625.221	261.771.625.221	36.389.453.414,00	13,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	559.600.000	559.600.000	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	6.110.971.005	6.110.971.005	4.412.018.692,00	72,19
Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145	18.492.352.145	1.899.999,00	0,01
Belanja Tidak Terduga	22.172.915.145	18.492.352.145	1.899.999,00	0,01
Belanja Tranfer	241.064.872.346	241.064.872.346	123.454.141.856,00	51,21
Belanja Bagi Hasil	6.111.780.450	6.111.780.450	3.055.890.257,00	50,00
Belanja Bantuan Keuangan	234.953.091.896	234.953.091.896	120.398.251.599,00	51,24
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	552.779.266.935	555.814.594.097	176.900.000,00	0,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	548.779.266.935	551.814.594.097	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	176.900.000,00	4,42
Pengeluaran Pembiayaan	58.318.896.928	58.318.896.928	48.318.896.928,00	82,85
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	28.318.896.928	28.318.896.928	28.318.896.928,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>494.460.370.007</b>	<b>497.495.697.169</b>	<b>(48.141.996.928,00)</b>	<b>(9,67)</b>
<b>SILPA</b>	<b>299.863</b>	<b>1.777.025.987</b>	<b>189.846.781.591,89</b>	<b>7.369,83</b>

Adapun Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2023. Berikut data capaian serapan Keuangan dan Fisik RKPD per Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 2.2 Realisasi Belanja per Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2023**

No	SKPD	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	514,326,756,230	217.012.295.870	42,19	38,55
2	Dinas Kesehatan	285,885,242,653	102.566.264.652	35,88	39,09
3	RSUD H Boejasin	122,961,484,725	38.630.794.936	31,42	31,83
4	RSUD KH Mansyur Kintap	19,474,423,058	6.879.805.827	35,33	35,66
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	451,705,927,786	89.392.921.695	19,79	16,28
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	87,361,332,194	15.063.778.398	17,24	28,36
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14,554,047,199	6.901.272.271	47,42	50,88
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,695,669,901	2.056.535.655	43,80	43,8
9	Dinas Sosial	13,013,305,352	2.860.429.293	21,98	50,14
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12,146,930,591	4.405.415.188	36,27	29,51
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15,787,105,456	4.904.628.033	31,07	38,6
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8,264,794,594	2.984.383.194	36,11	19,69
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,379,687,027	3.599.949.651	42,96	43,5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,096,264,906	5.107.864.846	29,88	48,92
15	Dinas Perhubungan	14,566,796,089	4.278.822.845	29,37	54,65
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,298,548,208	4.068.077.700	28,45	28,45
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	12,313,859,849	4.342.991.879	35,27	67,65
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,672,701,131	2.534.637.759	44,68	48,56
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	24,847,562,150	17.963.700.577	72,30	71,91
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,681,917,633	2.835.888.661	49,91	49,94
21	Dinas Pariwisata	11,994,368,875	7.489.025.280	62,44	74,04
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39,056,513,071	12.954.765.731	33,17	33,17
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12,450,822,939	4.178.376.525	33,56	33,55
24	Sekretariat Daerah	76,738,502,712	38.066.856.634	49,61	56,24
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51,257,055,256	24.862.160.727	48,50	50,63

No	SKPD	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,379,488,744	4.409.093.340	38,75	56,57
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	281,560,321,026	137.351.392.125	48,78	59,8
28	Badan Pendapatan Daerah	12,033,824,888	3.537.679.683	29,40	50,67
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,337,865,063	5.266.300.429	46,45	46,98
30	Inspektorat Kabupaten	17,368,827,849	8.076.727.632	46,50	46,5
31	Kantor Kecamatan Bajuin	4,415,131,963	1.922.185.471	43,54	49,06
32	Kantor Kecamatan Bati-Bati	4,892,608,281	1.972.896.899	40,32	55,85
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	4,622,293,899	1.886.421.580	40,81	57,13
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	4,873,725,756	2.162.260.992	44,37	45,19
35	Kantor Kecamatan Jorong	4,382,061,656	1.327.041.288	30,28	32,28
36	Kantor Kecamatan Kintap	4,957,639,051	1.855.019.607	37,42	62,49
37	Kantor Kecamatan Kurau	4,305,800,362	1.843.568.319	42,82	50,3
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	17,525,282,356	8.461.211.949	48,28	53,28
39	Kantor Kecamatan Panyipatan	4,810,331,544	1.785.164.176	37,11	36,74
40	Kantor Kecamatan Takisung	4,807,618,010	1.881.285.443	39,13	39,62
41	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	4,802,108,914	1.677.173.699	34,93	34,93
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13,821,730,790	8.252.667.380	59,71	56,57
	<b>TOTAL</b>	<b>2,256,428,279,737</b>	<b>819.609.733.839</b>	<b>36,32</b>	<b>45,66</b>

Sumber: SIPD Kab. Tanah Laut

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja RKPD pada Triwulan II Tahun 2023**

No	Kab/Kota	Triwulan	Rata-rata tingkat capaian RKPD		Predikat	
			Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik
1	Tanah Laut	II	35,49 %	38,09 %	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Laporan kinerja pada emonev kab. Tanah Laut

\*Keterangan:

SR: predikat kinerja dan realisasi anggaran Sangat Rendah (< 50%), menurut Tabel T.-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Nilai (Permendagri 86/2017).

Adapun Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terlampir dalam dokumen RKPD ini.

Adapun faktor penghambat dan permasalahan dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan dalam implementasi SIPD pelaporan dan Akuntansi dimana ada data realisasi yang belum dapat terekam seperti belanja BLUD, Dana Desa, dan BOS .
2. Terlambat terbitnya Hasil Pemetaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan DAK terlambat.
3. Adanya keterlambatan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen pengadaan sehingga proses pengadaan pada LPSE mundur dari jadwal yang direncanakan

Sedangkan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi internal SKPD.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja Aparatur.
5. Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jada sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tender ulang.
6. Setiap perangkat perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU)



serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi emonev.



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Kerangka Ekonomi Makro

##### 3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Berdasarkan berita resmi yang dirilis oleh BPS RI bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 mencapai Rp 5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,03 persen (y-on-y). Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,92 persen (q-to-q).



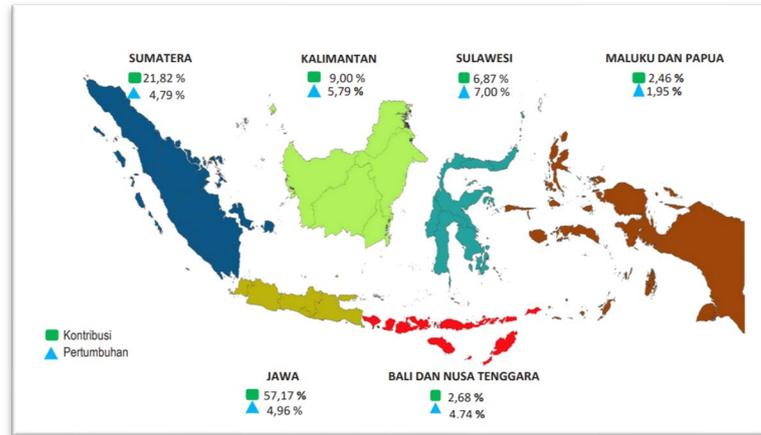
Sumber: BPS RI

**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan**

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen.

Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar

5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen



Sumber : BPS RI

**Gambar 3.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2023 (persen)**

### 3.1.2 Ekonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan data dari BPS, Pada triwulan I-2023 Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,12 persen jika dibandingkan triwulan I-2022 (y-on-y). Ekonomi Kalimantan Selatan triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar -5,52 persen (q-to-q). Kontraksi pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya Konstruksi mencapai 11,65 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,78 persen dan Pertambangan sebesar 10,22 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 6,46 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 3,25 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,41 persen.

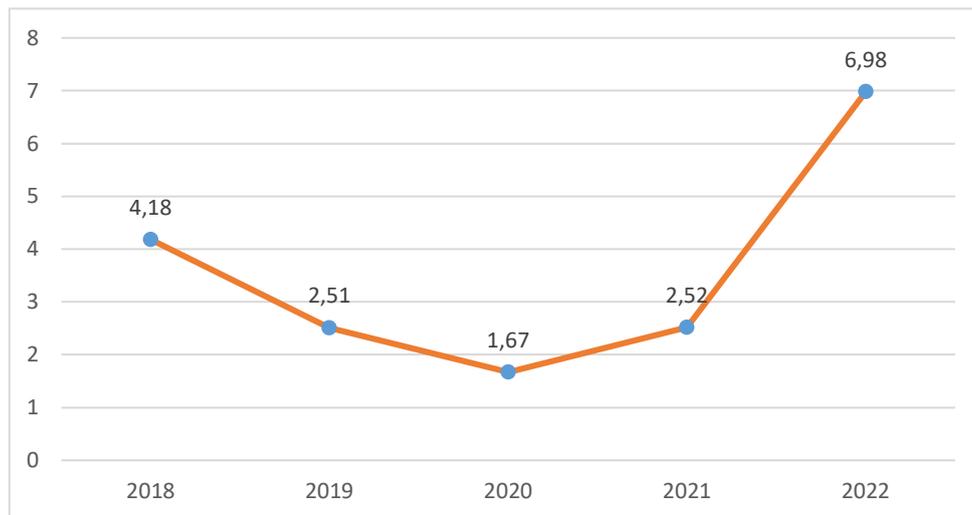


Sumber : BPS Kalimantan Selatan

**Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)**

### 3.1.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin, 2017-2022**

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun). Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin. Pada periode 2018-2020 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari 4,18% menjadi 1,67%, kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 2,52% dan kembali naik menjadi 6,98% pada tahun 2022. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

## 3.1.4 Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Laut

### 3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2018-2022, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 13.241.237,45 juta pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902.297,08 juta pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 13.786,685,56 juta, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi 15.326.244,74 juta, dan kembali naik pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.995,214,72 juta pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,648,31 juta, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,061, 96 juta, namun kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022.

**Tabel 3.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022**

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2018	13.241.237,45	9.995.214,72
2019	13.902.297,08	10.366.648,31
2020	13.786.685,56	10.164.061,96
2021*	15.326.244,74	10.515.159,53
2022**	19.019.178,93	11.053.374,62

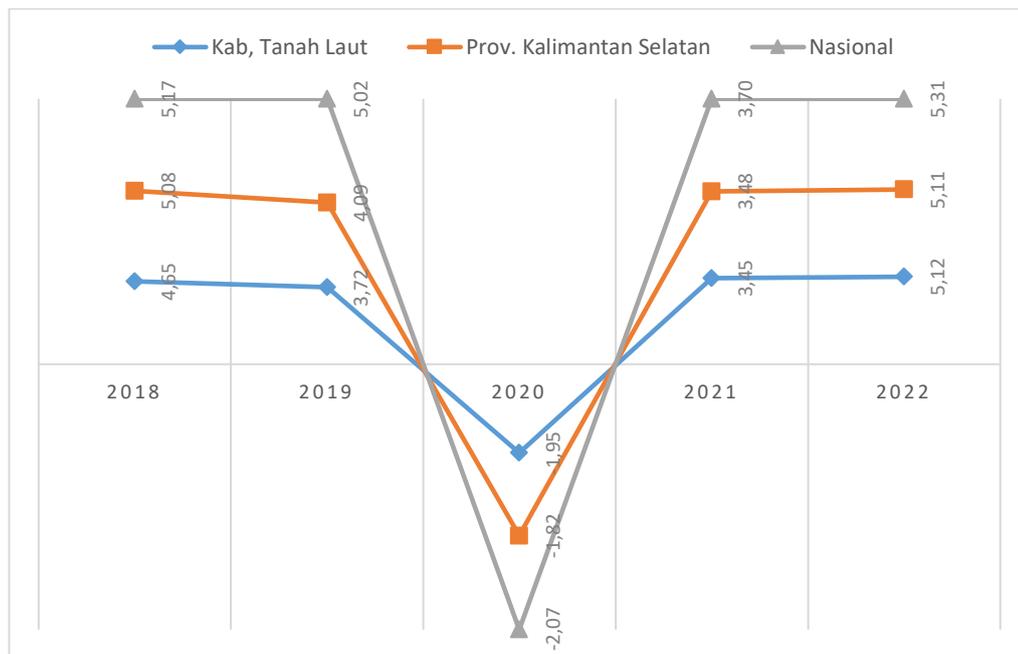
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

**Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,42	-0,30	1,73	2,70
Pertambangan dan Penggalian	2,36	0,73	-4,96	4,45	6,22
Industri Pengolahan	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,86
Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	4,07	5,02	4,78	7,79
Pengadaan Air	6,66	3,45	3,45	3,91	4,96
Konstruksi	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,21	6,57	-2,89	2,48	7,10
Transportasi dan Pergudangan	6,92	5,93	-1,87	1,59	13,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	6,18	-1,23	2,29	6,54
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,33	6,34	6,57	6,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,3	2,29	-1,44	0,54
Real Estate	4,93	4,72	1,90	5,10	4,59
Jasa Perusahaan	7,25	7,16	-1,74	3,49	6,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	8,33	1,14	4,71	-0,54
Jasa Pendidikan	7,22	6,02	2,64	0,83	3,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	4,78	7,52	8,20	4,59
Jasa lainnya	7,02	6,78	-0,86	0,84	6,29
<b>PDRB</b>	<b>4,65</b>	<b>3,72</b>	<b>-1,95</b>	<b>3,45</b>	<b>5,12</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu -0,54 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun sebelumnya pertumbuhannya paling rendah yaitu -1,44 persen pada tahun 2022 naik menjadi 0,54 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling besar pada tahun 2022 yaitu 13,64 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

**Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022**

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi

covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di atasnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2022 mencapai 3,11%. Dan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 mencapai 5,31%.

### 3.1.4.2 Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

**Tabel 3.3 Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi Tahun 2021**

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	845,192,000,000	662,410,200,000	78%
2020	887,452,000,000	1,614,763,180,000	182%
2021	931,824,000,000	773,620,960,000	83%
2022	978,415,000,000	1,588,807,660,000	162%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tanah Laut, 2023

## 3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

### 3.2.1 Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perencanaan pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2023 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perhitungan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2023 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023, secara keseluruhan proyeksi pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 menurun 2 % atau Rp. 43.330.853.938 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.761.088.881.265 menjadi Rp. 1.717.758.027.327.

### 3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami Penurunan sebesar Rp. 7.900.680.699 (4 %) dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 223.171.641.465 menjadi Rp. 215.270.960.766.

### 3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan Penurunan sebesar Rp. 35.474.137.408 (2 %) dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.536.761.239.800 menjadi Rp. 1.501.287.102.392.

### 3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga / Sejenis, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Lain-lain Pendapatan, Pendapatan Hibah Dana BOS, Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan naik sebesar Rp. 43.964.169 atau 4 %. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan karena adanya Sumbangan dari Pihak Ketiga/Sejenis.

Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		RKPD 2023	Perda APBD T.A. 2023	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2023
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.477.759.476.076,00</b>	<b>1.761.088.881.265</b>	<b>1.732.321.617.327</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>206.460.699.239,00</b>	<b>223.171.641.465</b>	<b>215.270.960.766</b>
4.1.01	Pajak Daerah	42.569.000.000,00	49.171.000.000	49.300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.800.440.042,00	11.946.804.500	8.370.182.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	13.330.112.415	11.855.308.674
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.091.259.197,00	148.723.724.550	145.745.469.592
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.271.298.776.837,00</b>	<b>1.536.761.239.800</b>	<b>1.515.850.692.392</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.439.076.837,00	1.414.901.539.800	1.393.990.992.392
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.045.439.076.837,00	1.305.643.438.800	1.284.732.891.392
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	551.132.630.837,00	548.181.440.800	548.181.440.800
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	494.306.446.000,00	512.108.210.000	493.534.142.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	71.785.665.000	71.473.033.180
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	173.568.123.000	171.544.275.412
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	104.000.000.000,00	109.258.101.000	109.258.101.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000,00	121.859.700.000	121.859.700.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.859.700.000,00	121.859.700.000	121.859.700.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>1.156.000.000</b>	<b>1.199.964.169</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.156.000.000	1.156.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	43.964.169

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2023

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah arah kebijakan dapat dilakukan antara lain:

1. Menggali pendapatan daerah.
2. Memberikan stimulus fiskal terhadap usaha masyarakat (UMKM).
3. Mendorong relaksasi di bidang perbankan.
4. Melakukan kerjasama mutualisme dengan perusahaan- perusahaan.

### 3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang penganggarannya kurang, adanya kebijakan penyesuaian Anggaran dan karena adanya belanja mendahului perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

#### 3.3.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan kelompok anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penambahan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada proyeksi perubahan RKPD ini, Belanja Operasi terjadi peningkatan dari APBD Murni sebesar 6 %. Kenaikan belanja ini disebabkan

1. adanya penyesuaian dengan penambahan-penambahan pada belanja transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus yang pemetaan kegiatannya baru keluar bertahap pada bulan April tahun 2023.
2. kewajiban daerah dalam mengakomodir pemenuhan Belanja Pegawai untuk penerimaan PPPK di bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Teknis.
3. adanya kebijakan belanja operasi terkait belanja hibah untuk persiapan pemilihan kepala daerah serentak pada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum,
4. belanja untuk mitigasi dan penanggulangan kondisi kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang melanda.

#### 3.3.2. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada proyeksi

perubahan RKPD 2023 ini, belanja modal terjadi peningkatan dari APBD Murni sebesar 8 %. Peningkatan ini diperuntukan untuk pemenuhan infrastruktur seperti jalan, pendidikan dan lain lain.

### 3.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 21.992.352.145 dan mengalami penurunan sebesar 1 %.

### 3.3.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 242.677.772.346 atau mengalami kenaikan sebesar 1 %. Kenaikan ini disebabkan penambahan untuk belanja bagi hasil ke desa dan insentif untuk desa yang meningkatkan status IDM nya menjadi Mandiri.

## 3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2023 sebesar Rp. 497.495.697.169 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 direncanakan menjadi Rp. 813.384.654.012 atau naik sebesar Rp. 315.888.956.843 (64 %). Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2023, dialokasikan untuk penyertaan modal. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### 3.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022, dan untuk penerimaan SiLPA pada Perubahan RKPD ini diproyeksikan meningkatkan menjadi Rp. 831.703.550.940. jika dibandingkan proyeksi APBD Murni

sebesar Rp. 551.814.594.097. Peningkatan angka ini terjadi setelah perhitungan yang telah di audit oleh BPK RI pada Laporan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022.

#### 3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

- Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk APBD Murni sebesar Rp. 58.318.896.928 dan untuk Perubahan RKPD ini diproyeksikan menjadi Rp. 93.318.896.928, Adapun adanya penambahan proyeksi pembiayaan pada beberapa Perusahaan Daerah antara lain:

1. Penyertaan modal ke PT. BPR sebesar 10 Miliar sudah terdapat kajiannya, dimana rekomendasi dari kajian tersebut, PT. BPR layak diberikan penyertaan modal.
2. Penyertaan modal di PT. Tanah Laut Manuntung sebesar 10 Miliar sudah terdapat kajiannya, dimana rekomendasi dari kajian tersebut, PT. Tanah Laut Manuntung layak diberikan penyertaan modal.
3. Untuk kajian penyertaan modal ke PT. AM Berkah Banua akan dilakukan pada Perubahan 2023.
4. Sedangkan untuk pinjaman daerah pada PT. BPR terjadi kenaikan sebesar 5 Miliar dikarenakan janji Bupati untuk menyediakan pinjaman nol persen sebesar 150 Miliar. Sedangkan sampai tahun 2023 ini baru dipinjamkan dana sebesar 45 Miliar, sehingga dengan adanya penambahan 5 Miliar akan menjadi 50 Miliar atau 50% dari janji Bupati.

Adapun rincian penambahan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 3.5 APBD Murni 2023 dan Proyeksi Perubahan APBD 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		RKPD 2023	Perda APBD T.A. 2023	ABPD Pergeseran V T.A 2023	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2023
1	2	3	4	5	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.477.759.476.076</b>	<b>1.761.088.881.265</b>	<b>1.761.088.881.265</b>	<b>1.732.321.617.327</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>206.460.699.239</b>	<b>223.171.641.465</b>	<b>223.171.641.465</b>	<b>215.270.960.766</b>
4.1.01	Pajak Daerah	42.569.000.000	49.171.000.000	49.171.000.000	49.300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.800.440.042	11.946.804.500	11.946.804.500	8.370.182.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000	13.330.112.415	13.330.112.415	11.855.308.674
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	143.091.259.197	148.723.724.550	148.723.724.550	145.745.469.592
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.271.298.776.837</b>	<b>1.536.761.239.800</b>	<b>1.536.761.239.800</b>	<b>1.515.850.692.392</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.149.439.076.837	1.414.901.539.800	1.414.901.539.800	1.393.990.992.392
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.045.439.076.837	1.305.643.438.800	1.305.643.438.800	1.284.732.891.392
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	551.132.630.837	548.181.440.800	548.181.440.800	548.181.440.800
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	494.306.446.000	512.108.210.000	512.108.210.000	493.534.142.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	71.785.665.000	71.785.665.000	71.473.033.180
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	173.568.123.000	173.568.123.000	171.544.275.412
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	104.000.000.000	109.258.101.000	109.258.101.000	109.258.101.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000	121.859.700.000	121.859.700.000	121.859.700.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.859.700.000	121.859.700.000	121.859.700.000	121.859.700.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>1.156.000.000</b>	<b>1.156.000.000</b>	<b>1.199.964.169</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.156.000.000	1.156.000.000	1.156.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	43.964.169
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.626.991.828.215</b>	<b>2.255.548.951.409</b>	<b>2.256.807.552.447</b>	<b>2.411.267.702.392</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.157.648.342.607</b>	<b>1.434.964.476.863</b>	<b>1.441.449.319.848</b>	<b>1.543.632.190.942</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	644.434.937.260	752.559.542.098	752.559.542.098	775.304.987.027
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.999.943.681	614.236.841.999	614.409.163.655	650.553.841.135
5.1.05	Belanja Hibah	49.075.901.666	57.166.102.766	63.478.624.095	106.667.572.780
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.137.560.000	11.001.990.000	11.001.990.000	11.105.790.000

# Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023



KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		RKPD 2023	Perda APBD T.A. 2023	ABPD Pergeseran V T.A 2023	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2023
1	2	3	4		5
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>209.411.550.708</b>	<b>555.801.008.108</b>	<b>555.801.008.108</b>	<b>602.965.386.959</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.00	1.481.250.000	1.481.250.000	1.557.625.889
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.194.594.484	100.996.983.239	100.996.983.239	112.299.063.371
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.719.789.094	184.880.578.643	184.880.578.643	191.410.800.864
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.942.106.130	261.771.625.221	261.771.625.221	290.804.925.830
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	293.950.000	559.600.000	559.600.000	752.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		6.110.971.005	6.110.971.005	6.140.971.005
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>22.172.915.145</b>	<b>18.492.352.145</b>	<b>21.992.352.145</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	22.172.915.145	18.492.352.145	21.992.352.145
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>234.931.934.900</b>	<b>241.064.872.346</b>	<b>241.064.872.346</b>	<b>242.677.772.346</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.236.944.004	6.111.780.450	6.111.780.450	6.124.680.450
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		4.917.100.000	4.917.100.000	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		1.194.680.450	1.194.680.450	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.694.990.896	234.953.091.896	234.953.091.896	236.553.091.896
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		234.953.091.896	234.953.091.896	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(149.232.352.139)</b>	<b>(494.460.070.144)</b>	<b>(495.718.671.182)</b>	<b>(678.946.085.065)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>204.232.352.139</b>	<b>552.779.266.935</b>	<b>555.814.594.097</b>	<b>906.703.550.940</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.232.352.139	548.779.266.935	551.814.594.097	831.703.550.940
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	75.000.000.000
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	-	-	-	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>58.318.896.928</b>	<b>58.318.896.928</b>	<b>93.318.896.928</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	28.318.896.928	28.318.896.928	58.318.896.928
	PT. Bank Kalsel	25.000.000.000	28.318.896.928	28.318.896.928	28.318.896.928
	PT. BPR	-	-	-	10.000.000.000



KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		RKPD 2023	Perda APBD T.A. 2023	ABPD Pergeseran V T.A 2023	Proyeksi Pada Perubahan RKPD T.A. 2023
1	2	3	4		5
	PT. Tanah Laut Manuntung	-	-	-	10.000.000.000
	PT. Air Minum Berkah Banua (Perseroda)	-	-	-	10.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
	PT. BPR (Gapura Karomah)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>149.232.352.139</b>	<b>494.460.370.007</b>	<b>497.495.697.169</b>	<b>813.384.654.012</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>			<b>299.863</b>	<b>299.863</b>	<b>134.438.568.947</b>

Sumber: BPKAD Kab. Tanah Laut. 2023

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir dari Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataanruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2021, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 disajikan di Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kabupaten Tanah Laut**

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,35	70,4-70,72	70,4-70,72	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	7,90	8,07	8,07
						Harapan lama sekolah	12,32	13,22	13,22
					Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja	975	500	500
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,35	70,4-70,72	70,4-70,72	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,8	69,8
						Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>	100	100	100
Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,65	80 (baik)	80 (baik)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> )	2,12	1,1	1,1



Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	98,78	100	100
						Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	100
					Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	100	100
						Indeks Pembangunan Pemuda	-	46,75	46,75
						Jumlah Atlet yang berprestasi	534	89	89
					Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
						ditindaklanjuti oleh SKPD (%)			
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan <i>inovasi public</i>	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	10 inovasi	2 inovasi	2 inovasi
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	134 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)	5 usaha	5 usaha	5 usaha
					Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	134 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64 (baik)	64 (baik)	64 (baik)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	B	A (81)	A (81)
						Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	WTP
					Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	58,98	59,52	59,52
					Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40	25	25

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	100	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0
					Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0
					Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	10 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan	3,86	4,35-4,30	4,35-4,30	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,0-5,05	4,0-5,05
						Indeks Gini (skor)	0,263	0,253	0,253
						PDRB per kapita	30,62	39,02	39,02
					Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	87,28	89,50	89,50
					Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,17	2,5	2,5

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
						Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	156	120 (sedang)	120 (sedang)
					Meningkatnya perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100
						Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	13,32	30	30
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	58,12	73	73	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	73,48	85	85
						Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	68,07	100	100
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	71,91	80	80
						Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak (%)	73,45	45	45

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	13,66	5,06	5,06	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%	309	135	135
						Pertumbuhan sektor Pertanian	2,7	3,57	3,57
						Pertumbuhan sektor Industri olahan	3,86	7,6	7,6
						Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	219,258	350	350
					Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	90,7	95	95
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,78	61,71	68,47	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	67,78	61,71	68,47

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	97	98	98
Peningkatan Upaya Membina Desa dan Menata Kota	Indeks Desa Membangun	0,707	0,815 (mandiri)	0,815 (mandiri)	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik (%)	100	100	100
						Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun (%)	100	100	100
						Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)	29	20	20
						Jumlah Desa di bina berciri khas	7	5	5
					Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di	0,21	1	1

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Target 2023		Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	
			Murni	Perubahan				Murni	Perubahan
						kawasan perkotaan (%)			
						Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)	61,97	80	80

Dari beberapa indikator tujuan dan sasaran, terdapat perubahan target indikator tujuan dan sasaran yaitu pada Indikator IKLH yang mana pada RKPD 2023 targetnya sebesar 61,71 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 targetnya menjadi 68,47 dikarenakan adanya perubahan komponen perhitungan IKLH.

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

### 4.2.1 Keselarasan Tema dan Prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Tanah Laut Tahun 2023

#### 4.2.1.1 Tema dan Prioritas RKP Nasional Tahun 2023

Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 pada Pra Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022 yaitu terbagi menjadi:

#### 1. Isu Global

- Pasokan Pangan dan Energi
- Pembatasan Mobilitas
- Investasi
- Mobilitas

#### 2. Isu Nasional

- Defisit Fiskal
- Investasi
- Rantai Nilai
- Daya Beli

#### 3. Isu Lokal

- Pemantapan Pemulihan Ekonomi
- Daya beli
- Pengangguran
- Pemerataan
- Bencana

Sasaran dan arah kebijakan di tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 dan berbagai masukan dari hasil konsultasi publik, perkembangan mutakhir dari isu nasional dan global serta pengarahan Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna pada Agustus 2021 lalu. Tema RKP 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk**

**Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Sesuai dengan tema RKP 2023 maka arah dan kebijakan RKP 2023 akan fokus pada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas.
8. Pembangunan ibu kota negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 5,3 -5,9%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 5,3-6,0 %
3. Rasio Gini sebesar (Nilai) 0,375- 0,378
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49
6. Nilai Tukar Petani/NTP (Nilai) sebesar 103-105
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107
8. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,5-8,5%

RKP 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, disusun dengan prinsip money follows program dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

**Tabel 4.2 Tema RKP dan Prioritas Nasional Tahun 2023**

<b>Tema RKP 2023</b>	<b>Prioritas Nasional (PN)</b>	
<b><i>Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.</i></b>	PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	PN 3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Tema RKP 2023	Prioritas Nasional (PN)	
	PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Sebagai *clearing house* pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan sejumlah Major Project (MP) untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) RKP 2023. Adapun Major Project (MP) tersebut, yakni:

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
2. Pengelolaan Terpadu UMKM,
3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan),
4. Destinasi Pariwisata Prioritas,
5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi,
6. Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay,
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara,
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial,
9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
10. Reformasi Pendidikan Keterampilan,
11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu,
13. Transformasi Digital, dan
14. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3.

#### 4.2.1.1 Tema dan Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang

belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, adapun permasalahan daerah tersebut yaitu:

1. Pandemi Covid-19
2. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat
3. Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal
5. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan
6. Perpindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur dan Penetapan Food Estate di Kalimantan Tengah
7. Belum efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengidentifikasi permasalahan daerah yang muncul atau yang berkaitan dengan pandemi covid-19. adapun permasalahan daerah tersebut meliputi:

1. Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid 19
2. Meningkatnya Pengangguran karena Pekerja pada Perusahaan yang dirumahkan dan di PHK
3. Meningkatnya Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan
4. Menurunnya Kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian

Dari permasalahan daerah tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Isu Strategis Daerah, yaitu:

1. Lingkungan Hidup
2. Infrastruktur
3. Sumber Daya Manusia
4. Ekonomi
5. Tata Kelola Pemerintahan
6. Gerbang IKN Baru dan Food Estate

Dari isu strategis tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yaitu, **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”**. Dengan meletakan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 pada:

1. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan;
2. UMKM dan Ketenagakerjaan;
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian, dan Pariwisata;
4. Banjir dan Covid-19;

Sementara itu Prioritas daerah provinsi kalimantan selatan tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023**

Tema RKPD 2023	Prioritas Daerah (PD)	
<b>Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan</b>	PD 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
	PD 2	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata
	PD 3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah
	PD 4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik
	PD 5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana
	PD 6	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, 2022 (diolah)

#### 4.1.1.3 Tema dan Prioritas RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

**Tabel 4.4 Tema Pembangunan dan Prioritas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023**

TEMA PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN (PD)
<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Untuk Pemantapan Kebijakan Berinteraksi Dalam Membina Desa Dan Menata Kota Sebagai Pondasi Pembangunan Yang Berkelanjutan</b>	PD 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	PD 2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	PD 3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Sumber: Bappeda Kab. Tanah Laut, 2022

Sebagai satu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dirumuskan dengan sepenuhnya menyinkronkan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai melalui pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2023 dengan prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 4.5 Keselarasan Sasaran Daerah dengan Prioritas RKPD Tahun 2023**

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini PDRB per kapita

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0%
		Pertumbuhan sektor Pertanian
		Pertumbuhan sektor Industri olahan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah
		Skor PPH Ketersediaan
		Desa Berketahanan Pangan
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pembinaan Desa	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahan baik
		Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun
		Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7)
		Jumlah Desa di bina berciri khas
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah
		Harapan lama sekolah
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
		Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil
		Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah
		Indeks Pembangunan Pemuda
	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah Atlet yang berprestasi
		Jumlah konflik intern dan antarumat beragama
Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial	
Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan	
Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender	

PRIORITAS RKPD	SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN
	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD
	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Persentase PMKS yang menjadi mandiri
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
		Cakupan penduduk berakses air minum sehat
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Persentase Penataan Pasar Pelaihari		

Sumber : Bappeda Kab. Tanah Laut

Arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 seperti uraian berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
  - a. Peningkatan produksi hasil pertanian
  - b. Penataan Klaster Industri
  - c. Peningkatan konektivitas sentra produksi produk unggulan
  - d. Peningkatan potensi objek wisata yang telah ada
  - e. Peningkatan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru

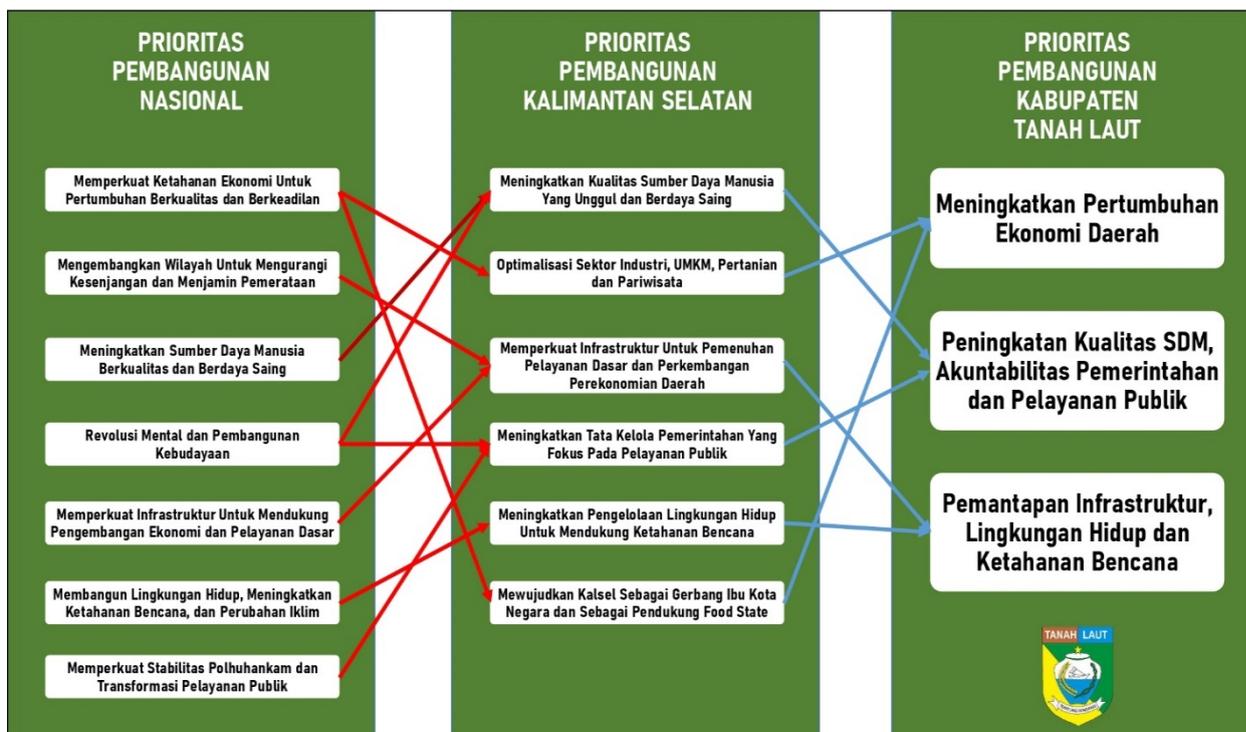
- f. Peningkatan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
  - g. Peningkatan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
  - h. Peningkatan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
  - i. Peningkatan perlindungan sosial
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Pemerintah dan Pelayanan Publik
- a. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
  - b. Peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda
  - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan
  - d. Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar/warisan budaya
  - e. Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang tangguh baik sebagai entrepreneur maupun pegawai
  - f. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
  - g. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
  - h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
  - i. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
  - j. Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana
  - k. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP
  - l. Peningkatan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B, C)
  - m. Peningkatan jumlah Guru yang tersedia
  - n. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya
  - o. Menejemen Perubahan
  - p. Penataan Peraturan Perundang - Undangan
  - q. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - r. Penataan Tata Laksana
  - s. Penataan Sistem Menejemen Sumber Daya Manusia
  - t. Penguatan Akuntabilitas
  - u. Penguatan Pengawasan
  - v. Whistle-Blowing System



3. Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
  - a. Pemantapan dan Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan, jembatan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan
  - b. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
  - c. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan
  - d. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana

## 4.2.2 Sinkronisasi prioritas RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RKPD Tanah Laut

**Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Tanah Laut Th. 2023**



Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022 (diolah)

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Daerah**

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG Mendukung PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG Mendukung PRIORITY DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
<b>3</b>	Pemantapan Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

Sumber: BAPPEDA Kab. Tanah Laut, 2022

Selanjutnya di bawah ini disajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Provinsi:

**Tabel 4.7 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Provinsi**

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
2	Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
6	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara Dan Sebagai Pendukung Food Estate	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	PRIORITAS DAERAH	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022

Kemudian kami sajikan juga tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional:

**Tabel 4.8 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 yang Mendukung Prioritas Nasional**

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		4	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		9	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		11	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		12	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		13	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		14	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		15	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		16	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		18	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		19	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		21	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		22	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		24	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		25	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		26	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		27	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		28	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		29	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		30	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		31	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		32	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		33	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		34	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		35	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		36	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		37	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		38	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		40	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		41	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		5	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		6	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		9	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		10	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		13	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		14	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		15	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		16	Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		18	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		20	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		21	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		22	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		23	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		24	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		25	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		27	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		8	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		10	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		14	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		15	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		20	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		21	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		22	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
				Perempuan dan Perlindungan Anak
		24	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		25	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		27	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		28	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		29	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
		31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
		32	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		33	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		34	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		35	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		36	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		38	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		39	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		40	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		41	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		45	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS NASIONAL	NO	PROGRAM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	SKPD PENANGGUNGJAWAB
		46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		47	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Kabupaten
		50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
		51	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Seluruh Kecamatan
		53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
		54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seluruh Kecamatan
		55	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		56	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		57	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		58	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		59	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD

Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Laut Tahun 2022

## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan pada beberapa hal. sebagai berikut.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan. prioritas dan sasaran pembangunan. rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer;
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
5. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
6. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan. program maupun antar jenis belanja yang difokuskan untuk penanganan dampak perubahan cuaca ekstrim dan ketahanan sumber daya pangan terhadap perubahan cuaca ekstrim tersebut.

Rekapitulasi jumlah program. kegiatan. sub kegiatan dan pagu indikatif per SKPD dalam Perubahan RKPD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. Pagu Indikatif per SKPD Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	34	160	317.919.090.477.00	12	34	168	513.939.626.391	12	34	169	548.145.282.844
2	Dinas Kesehatan	10	40	158	274.219.313.730.00	10	40	158	285.393.044.164	10	42	166	293.304.892.433
3	RSUD H. Boejasin	8	28	77	122.999.999.625.00	8	28	77	122.961.484.725	8	28	77	103.207.009.285
4	RSUD K.H. Mansyur Kintap	6	18	48	22.799.661.040.00	6	18	48	19.474.423.058	6	18	48	20.062.768.398
5	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Pertanahan	24	43	143	132.971.795.674.00	24	43	143	451.705.927.786	24	43	143	492.924.950.405
6	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	28	53	135	56.452.189.074.00	28	53	135	87.361.332.194	28	53	135	93.876.568.788
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8	24	83	13.385.236.527.00	8	24	83	14.554.047.199	8	24	83	15.668.058.106
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	21	61	4.652.919.360.00	4	21	61	4.695.669.901	4	21	61	5.097.133.642
9	Dinas Sosial	12	30	97	12.493.417.217.00	12	30	97	13.013.305.352	12	30	97	13.369.475.301
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	16	37	87	10.574.327.534.00	16	37	87	12.146.930.591	16	37	87	11.937.954.063
11	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	38	82	8.951.014.577.00	16	39	94	15.787.105.456	16	39	94	15.888.065.891
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18	38	82	7.507.538.397.00	18	38	82	8.264.794.594	18	38	82	8.567.411.890
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	20	53	8.189.321.621.00	8	20	53	8.379.687.027	8	20	53	9.440.464.831
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	19	65	16.687.187.815.00	8	19	65	17.096.264.906	8	19	65	17.378.496.453
15	Dinas Perhubungan	6	36	71	8.736.023.571.00	6	36	71	14.566.796.089	6	36	71	14.368.278.981
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	24	74	9.343.001.924.00	10	24	74	14.298.548.208	10	24	74	15.287.737.415



NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
17	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Perdagangan	24	42	76	9.959.714.981.00	24	43	77	12.313.859.849	24	43	78	12.570.639.791
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	26	60	4.669.394.206.00	12	26	60	5,672,701,131	12	26	60	5.861.464.013
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	8	30	83	12.506.895.159.00	8	30	83	24.847.562.150	8	30	83	33.373.695.075
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	22	50	5.407.510.581.00	6	22	50	5.681.917.633	6	22	50	6.288.417.633
21	Dinas Pariwisata	9	24	76	6.318.938.331.00	9	24	76	11.994.368.875	9	24	76	14.178.842.003
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	12	27	69	33.560.383.364.00	12	27	69	39,056,513,071	12	27	69	39.893.898.703
23	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	10	32	66	11.235.228.701.00	10	33	67	12.450.822.939	10	33	67	12.296.317.268
24	Sekretariat Daerah	6	36	132	71.943.947.642.00	6	36	132	76.738.502.712	6	36	132	83.787.906.179
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	30	86	50.619.700.142.00	4	30	86	51.257.055.256	4	30	86	53.535.295.137
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	32	75	10.255.576.927.00	8	32	75	11.379.488.744	8	32	75	12.213.838.331
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	24	112	278.590.200.110.00	6	24	112	285.240.884.026	6	24	112	292.651.009.207
28	Badan Pendapatan Daerah	4	16	71	11.156.496.437.00	4	16	71	12.033.824.888	4	16	71	13.218.331.173
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	24	70	10.460.924.896.00	6	24	70	11.157.302.063	6	24	70	11.389.342.314
30	Inspektorat Kabupaten	6	21	50	13.856.809.483.00	6	21	50	17.368.827.849	6	21	50	17.690.265.559
31	Kantor Kecamatan Bajuin	12	24	67	4.024.428.520.00	12	24	67	4.415.131.963	12	24	67	4.457.009.459
32	Kantor Kecamatan Bati-Bati	12	24	63	4.523.490.016.00	12	24	63	4.892.608.281	12	24	63	5.161.573.272
33	Kantor Kecamatan Batu Ampar	8	20	55	4.232.456.612.00	8	20	55	4.622.293.899	8	20	55	4.696.519.995
34	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	11	19	36	4.579.792.359.00	11	19	36	4.873.725.756	11	19	36	4.968.469.686



NO	SKPD	RKPD				APBD Murni				P - RKPD			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
35	Kantor Kecamatan Jorong	12	26	60	4.097.762.086.00	12	26	60	4.382.061.656	12	26	60	4.307.247.181
36	Kantor Kecamatan Kintap	12	27	80	4.479.611.142.00	12	27	80	4.957.639.051	12	27	80	5.225.486.010
37	Kantor Kecamatan Kurau	12	24	63	3.900.864.815.00	12	24	63	4.305.800.362	12	24	63	4.366.672.700
38	Kantor Kecamatan Pelaihari	12	27	87	16.406.114.992.00	12	27	87	17.525.282.356	12	27	87	17.969.142.825
39	Kantor Kecamatan Panyipatan	12	27	64	4.486.615.999.00	12	27	64	4.810.331.544	12	27	64	4.867.709.350
40	Kantor Kecamatan Takisung	12	24	65	4.568.568.754.00	12	24	65	4.807.618.010	12	24	65	4.819.964.969
41	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	12	22	55	4.464.076.553.00	12	22	55	4.802.108.914	12	22	55	5.126.245.289
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	24	69	8.804.287.244.00	12	24	69	10.321.730.790	12	24	70	57.827.850.544
	<b>TOTAL</b>	<b>454</b>	<b>1177</b>	<b>3316</b>	<b>1.626.991.828.215.00</b>	<b>454</b>	<b>1180</b>	<b>3338</b>	<b>2.255.548.951.409</b>	<b>454</b>	<b>1182</b>	<b>3349</b>	<b>2.411.267.702.392</b>

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan SKPD secara rinci disajikan dalam matriks pada lampiran II.

## BAB VI P E N U T U P

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Perubahan RKPD ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2023 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2023. Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan untuk menuju dan menstabilkan arah dan tujuan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. SUKAMTA**